

KENAIKAN HARGA MINYAK GORENG

KPPU Tengarai Ada Sinyal Kartel

JAKARTA (KR) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menengarai ada sinyal kartel dari kenaikan harga minyak goreng yang terjadi belakangan ini, akibat perusahaan-perusahaan besar di industri minyak goreng kompak menaikkan harga secara bersamaan. Meski demikian, secara hukum harus dibuktikan.

"Ini yang saya katakan ada sinyal terjadinya kesepakatan harga. Tapi, ini secara hukum harus dibuktikan lebih dulu," kata Komisioner KPPU Ukay Karyadi di Jakarta, Kamis (20/1).

Dalam paparan hasil penelitian KPPU selama tiga bulan terakhir lembaga itu, kenaikan harga minyak goreng disebabkan kenaikan harga bahan baku utama minyak kelapa sawit (CPO) di level internasional akibat permintaan yang meningkat. Berdasarkan data Consentration Ratio (CR) yang dihipunkan KPPU pada 2019 terlihat pula sekitar 40 persen pangsa pasar minyak goreng dikuasai empat perusahaan yang juga memiliki usaha perkebunan, pengolahan CPO, hingga beberapa produk turunan CPO seperti biodiesel, margarin dan minyak goreng.

Dengan struktur pasar seperti itu, maka industri minyak goreng di Indonesia masuk dalam kategori monopolistik yang mengarah ke oligopoli. Akibatnya, perusahaan minyak goreng relatif menaikkan harga secara bersama-

sama walaupun mereka masing-masing memiliki kebun sawit sendiri. "Perilaku semacam ini bisa diartikan sebagai sinyal, apakah terjadi kartel," katanya.

Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Renamangala menjelaskan, pelaku usaha terbesar minyak goreng di Indonesia adalah pelaku usaha yang terintegrasi dari perkebunan sawit dan pengolahan CPO. Sebagai komoditas global, kenaikan harga CPO menyebabkan produksi minyak goreng harus bisa bersaing dengan produk CPO yang diekspor.

Hal itu menyebabkan ketika harga CPO global sedang tinggi, produksi minyak goreng kesulitan mendapatkan bahan baku lantaran produsen lebih mengutamakan ekspor ke-timbang memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Ini kami lihat agak sedikit aneh, karena sebenarnya produsen minyak goreng ini perusahaan di kelompok yang ekspor CPO atau punya kebun. Seperti itu pelaku usaha yang melakukan ekspor ini, meski punya usaha mi-

nyak goreng, namun mere-

ka tetap mengutamakan pasar ekspor karena itu dapat meningkatkan keuntungan mereka," ujarnya.

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menyatakan, kebijakan minyak goreng satu harga Rp 14.000 per liter perlu diperluas ke pasar-pasar tradisional untuk menjangkau masyarakat kelas bawah. Menurutnya, konsumen pasar tradisional dan UMKM merupakan kelompok paling terdampak akibat melambungnya harga minyak goreng yang saat ini di kisaran Rp 20.000/liter.

Apalagi, kata Amin, berdasarkan studi Institute for Development on Economics and Finance (Indef), belanja penduduk miskin untuk membeli bahan pangan sebesar 52 persen dari total pengeluarannya, sedangkan masyarakat rentan miskin dan hampir miskin sebesar 62 persen.

Amin menyebutkan, kebijakan harga minyak goreng Rp 14.000/liter sebenarnya juga masih lebih tinggi dari acuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sederhana yang ditetapkan Pemerintah, yakni Rp 11.000/liter berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 7 Tahun 2020.

Ia berpendapat, Pemerintah seharusnya dapat lebih mengendalikan pasokan dan harga CPO untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya memenuhi minyak goreng dalam negeri. (Lmg/Sim)-f

KALURAHAN BUDAYA SUKORENO DIDUKUNG DANAIS Titik Tumpu Pengembangan Kebudayaan



Podcast Rembag Kaistimewan bertajuk 'Potensi Kalurahan Budaya Sukoreno, Kulonprogo'.

DAERAH Istimewa Yogyakarta identik dengan kalurahan budaya, salah satunya adalah Kalurahan Budaya Sukoreno di Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulonprogo. Keberadaan kalurahan budaya dengan berbagai potensi seni budaya yang dimiliki dan didukung oleh Dana Keistimewaan (Danais), menjadikan masyarakatnya menjadi lebih maju, sejahtera dan istimewa.

Paniradya Pati Kaistimewan DIY Aris Eko Nugroho SP MSi menjelaskan, sebuah kalurahan bisa disebut sebagai kalurahan budaya jika mampu mengaktualisasikan, mengembangkan dan mengkonversikan semua potensi yang ada di kalurahan tersebut yang berkaitan dengan budaya. Seperti tradisi, kuliner, kerajinan, bahasa, sastra, aksara dan tata ruang/arsitektur.

Menurut Aris, di Pemda DIY, inisiasi terkait kalurahan budaya sudah dimulai sejak 1995, dari yang awalnya hanya 30 kalurahan budaya di DIY, saat ini berkembang menjadi 76 kalurahan budaya. "Ini menjadi gambaran bahwa kalurahan budaya sangat potensial menjadi titik tumpu atau titik poin bagaimana budaya di tingkat kalurahan itu bisa dikembangkan," terang Aris dalam Podcast Rembag Kaistimewan bertajuk 'Potensi Kalurahan Budaya Sukoreno Kulonprogo'.

Podcast Rembag Kaistimewan diselenggarakan oleh Paniradya Kaistimewan

DIY di Gedung Paniradya Kaistimewan DIY, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kepatihan Danurejan Yogyakarta, Kamis (20/1) dan ditayangkan *live streaming* di channel YouTube Paniradya Kaistimewan DIY <https://youtube.com/c/PaniradyaKaistimewan>. Kegiatan ini didanai dengan Dana Keistimewaan.

Rembag Kaistimewan menghadirkan narasumber lain Olan Suparlan SSos (Lurah Kalurahan Sukoreno) dan L Sudjatmiko Edy Purwanto SSn (Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Kebudayaan DIY) dipandu Ninda Fillasputri.

Dikatakan Aris, mulai tahun 2022 ini, kalurahan budaya yang maju ada Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan yang kisarannya Rp 500 juta - Rp 1 miliar. "Kenapa kalurahan budaya ini sengaja dimunculkan, karena untuk memberikan informasi ke masyarakat bahwa Danais sudah ada di tengah-tengah kita. Karena selama ini belum banyak yang menginfokan atau memberitakan bahwa kalurahan budaya itu didukung oleh Danais. Kalurahan Sukoreno ini berbeda dengan kalurahan-kalurahan budaya yang lain, karena keunggulannya ada di tradisi sedekah bumi," ujarnya.

L Sudjatmiko Edy Purwanto menjelaskan, ada tiga kolompok/tingkatan kalurahan budaya, yang pertama adalah desa kantong bu-

daya, kemudian naik *level* menjadi desa rintisan budaya. Jika setelah dinilai layak maka akan naik menjadi desa/kalurahan budaya. "Tahun 2022 ini DIY mendapatkan tambahan 20 kalurahan/desa budaya hasil akreditasi rintisan desa budaya tahun 2021. Kemarin yang ikut akreditasi ada 37 rintisan desa budaya dan yang lolos ada 20 desa yang kemudian menjadi kalurahan budaya," katanya.

Menurut Sudjatmiko, seleksi untuk menjadi kalurahan budaya sangat ketat meliputi lima aspek antara lain mampu mengaktualisasikan, melestarikan, menjaga, mengembangkan budaya di daerahnya sebagai warisan bangsa. Budaya yang ada juga harus dilestarikan, disentuh dan dimiliki oleh masyarakatnya, tidak hanya didiami saja. Penilaiannya, selain dari segi administrasi, juga dilakukan survei untuk memastikan bahwa seni dan budaya yang ada benar-benar dilaksanakan oleh masyarakatnya.

"Ada tim seleksi yang kredibel yang terdiri dari berbagai unsur seperti akademisi, tokoh kebudayaan dan dinas terkait yang menilai dan menentukan lolos tidaknya desa menjadi desa budaya. Jadi nantinya tidak hanya karena Danaisnya, tapi masyarakatnya betul-betul mau mendukung, merasa memiliki (*melu handarbeni*), dan mau mengembangkan budaya di desa-

nya," ujarnya.

Olan Suparlan mengatakan, Kalurahan Sukoreno mendapat predikat sebagai kalurahan budaya sejak tahun 1995, jadi sudah sangat lama. Di sektor pertanian, Kalurahan Sukoreno sangat bagus karena memiliki tiga kali masa tanam (padi, padi, palawija). Kemudian di sektor kuliner, tahun 2021 Kalurahan Sukoreno mendapat pendampingan dari BBPOM Yogyakarta menjadi desa pangan aman, dan akan maju lomba tingkat nasional tahun ini. Di sektor kerajinan ada kerajinan kain perca, seni lukis batu. Di bidang seni budaya ada wayang kulit, ketoprak, oglek, angguk, jangguk yang merupakan kombinasi jathilan dan angguk.

Selain itu upacara adat juga masih lestari seperti tradisi mitoni, brokohan, tedak siten, pangkih mantan, upacara adat wiwitan, meri desa, tawu sedang dan lainnya. Sedangkan upacara sedekah bumi yang menjadi unggulan dari Kalurahan Budaya Sukoreno diwujudkan dengan memberikan pupuk organik ke tanaman pertanian. Menurut Olan, pupuk organik dibuat sendiri oleh warga melalui unit pengelolaan pupuk organik dan dibeli melalui Danais, dan kemudian dibagikan secara massal kepada masyarakat secara gratis saat upacara sedekah bumi. "Sedekah bumi ini membuat tanah pertanian menjadi lebih subur," pungkasnya. (Dev)

BUDAYAWAN CERDAS, DEKAT HB X

Hari Dendi Berpulang

YOGYA (KR) - Yogyakarta kembali kehilangan salah satu budayawan sekaligus Wakil Ketua Dewan Pendidikan DIY, Hari Dendi (81). Hari Dendi meninggal dunia di RS Panti Rapih karena sesak napas pada Kamis (20/1) sekitar pukul 06.53 WIB.



KR-Istimewa

Hari Dendi

Almarhum sempat disemayamkan di rumah duka di Ndalem Suryoputran, Kadipaten Wetan, Kecamatan Kraton dan Ndalem Mangkubum, sebelum dimakamkan di Makam Pakuncen, Yogyakarta pada pukul 15.00 WIB.

Almarhum yang dikenal dekat dengan Sultan Hamengku Buwono (HB) X tersebut semasa hidupnya aktif memberikan masukan terkait penyelenggaraan program pendidikan dan kebudayaan di DIY. Salah satu kegiatan budaya yang aktif digeluti dialog budaya Forum Jogja Semesta yang sering menghadirkan tokoh dengan beragam latar belakang, membahas isu terkini berkaitan dengan budaya Yogya.

"Almarhum Pak Hari Dendi merupakan

budayawan yang memiliki banyak referensi keilmuan. Meski sudah berusia 81 tahun, Romo Hari Dendi adalah sosok yang cerdas dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Banyak yang sudah dilakukan Pak Hari Dendi baik dalam kapasitas dewan pendidikan maupun budayawan. Kepergian almarhum membuat kami sulit untuk menemukan kembali sosok seperti beliau," kata Sekda DIY Drs K Baskara Aji, sesuai melayat dari rumah duka.

Selain aktif dalam berbagai kegiatan budaya, pria kelahiran Malang 19 Februari 1941 tersebut juga terjun di dunia pendidikan. Hari Dendi menduduki sederet jabatan penting mulai dari Ketua HIPMI DIY hingga Ketua Umum Kadin DIY. Hingga akhir hayatnya, Hari Dendi masih menjabat Dewan Penasihat Kadin DIY, Wakil Ketua Dewan Pendidikan DIY, Pengasuh Komunitas Budaya Yogya Semesta, Dewan Penasihat PERHEMI, dan Anggota Dewan Pakar AMA DIY. (Ria)-d

PEMILIHAN REKTOR UGM Masyarakat Bisa Ikut Berpendapat

YOGYA (KR) - Universitas Gadjah Mada (UGM) akan menyelenggarakan Seleksi Bakal Calon Rektor dan Pemilihan Calon Rektor Periode 2022-2027. Proses seleksi dimulai dengan pendaftaran pada 24 Januari hingga 9 Maret 2022. "Tahun ini menjadi momen penting bagi UGM. Karena universitas terbesar di Indonesia ini akan melakukan Seleksi Bakal Calon dan Pemilihan Calon Rektor Periode 2022-2027," ucap Ketua Panitia Kerja Prof Dr Subagus Wahyuono MSc Apt di Kampus UGM, Kamis (20/1).

Dikatakan, persyaratan bakal calon rektor diatur dalam Peraturan Majelis Wali Amanat UGM No 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Seleksi Calon Rektor dan Pemilihan Rektor Universitas Gadjah Mada. Di antaranya berkewarganegaraan Indonesia, berstatus sebagai dosen PNS atau dosen pegawai universitas.

Subagus menerangkan, terdapat sejumlah perubahan pada proses seleksi dan pemilihan periode kali ini dibandingkan periode sebelumnya. Salah satunya pada perlakuan publik dalam rangka memperkuat penerimaan publik. Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan ataupun komentar terhadap bakal calon rektor melalui laman yang disediakan. "Pertanyaan dan masukan ini digunakan pertimbangan oleh Panitia Kerja dalam penetapan bakal calon rektor. Masukan tersebut memperkaya pemahaman Senat Akademik untuk menyeleksi bakal calon menjadi tiga calon rektor, serta MWA memilih dan menetapkan Rektor UGM 2022-2027," paparnya. (Dev)-d

PERKARA TPPU RP 50 MILIAR Kejari Yogya Terima Limpahan Kasus Jiwasraya

YOGYA (KR) - Kejari Yogya menerima pelimpahan perkara terpidana kasus PT Asuransi Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro (52). Namun dalam perkara ini, Benny ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 50 miliar.

Kajari Yogya, Gatot Guno Sembodo SH MH, Kamis (20/1), mengungkapkan, perkara ini merupakan hasil penyidikan Bareskrim Polri yang dilimpahkan ke Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) di mana Benny Tjokro yang juga merupakan terpidana kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya ini, diduga menyembunyikan asal-usul kepemilikan yang sebenarnya.

"Diduga uang yang disembunyikan itu berasal dari tindak pidana menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia atau berasal dari tindak pidana lainnya. Dalam rangka penghimpunan dana itu, pernah dilakukan pertemuan di salah satu hotel di Yogya," ujarnya.

Untuk menjalankan modusnya, tersangka telah mendirikan PT Hanson Internasional dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri. Kedua perusahaan itu, diduga digunakan tersangka sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang dari hasil kejahatan dalam menghimpun dana masyarakat.

"Patut diduga dana yang dicuci tersebut berasal dari perusahaan-perusahaan lainnya milik tersangka. Dimana perusahaan telah menerima aliran dana terkait perkara tindak pidana korupsi," terangnya. (Sni)-f

UANG RATUSAN JUTA RUPIAH DISITA KPK Tangkap Tangan Hakim PN Surabaya

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jatim. Ada tiga orang yang telah diamankan KPK dalam OTT tersebut.

Mereka adalah hakim, panitera dan pengacara. "KPK telah melakukan OTT di PN Surabaya dengan mengamankan sejumlah uang dan pihak terkait," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufroon dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (20/1).

Sampai kemarin, kata Nurul Ghufroon, KPK masih memeriksa para pihak tersebut. "Saat ini, para pihak dimaksud sedang kami periksa untuk memperjelas duduk kasusnya," ujar Nurul Ghufroon.

Sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu selama 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap tersebut. Selain menangkap tangan tiga orang, KPK mengamankan uang ratusan juta rupiah yang diduga untuk menyuap dalam penanganan perkara tersebut. Namun, jumlahnya masih dihitung.

Sementara itu, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Ngarro mengungkapkan, hakim yang ditangkap adalah Itong Isaeni Hidayat SH MH. Sedangkan panitera pengganti (PP) PN Surabaya yang disebutkan turut terkena OTT yakni M Hamdan SH. (Ful)-d



KR-Antara/Yusuf Nugroho

BANJIR DI KUDUS: Dua anak melintasi jalan yang tergenang banjir di Desa Golantepus, Mejoba, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (20/1). Akibat intensitas hujan yang tinggi serta meluapnya Mrisen, menyebabkan ratusan rumah dan jalan utama di desa itu terendam banjir.

TARGET PADA 2024 Porsi Kredit UMKM 30%

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, saat ini porsi kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih kecil, sekitar 20 persen, padahal 99,9 persen pelaku usaha adalah UMKM. Untuk itu ditargetkan tahun 2024 porsi kredit untuk UMKM akan mencapai 30 persen.

"Kita tahu 99,9 persen pelaku usaha kita adalah UMKM. Meski jumlahnya besar, sampai saat ini porsi kredit di perbankan juga saya lihat masih belum berubah. Masih ada di kisaran, sekali lagi ini sudah mungkin tiga-empat kali saya sampaikan, di kisaran 20 persen saja. Oleh sebab itu, target kita di tahun 2024 bisa mencapai 30 persen porsi untuk UMKM kita," kata Presiden pada pertemuan tahunan industri jasa keuangan secara virtual di Jakarta, Kamis (20/1).

Dikatakan, untuk bisa sampai ke angka tersebut, tidak bisa mengandalkan pertumbuhan alamiah saja, diperlukan strategi yang harus dijalankan dengan terobosan-terobosan dari sekarang dan diikuti aksi-aksi yang serius, yang konsisten, dan berkelanjutan.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM 30 persen pada 2024, salah satu kebijakan prioritas di sektor jasa keuangan pada 2022 adalah memperluas akses keuangan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM. "Itu untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM 30 persen pada 2024," ujar Wimboh. (Lmg/Sim)-f